

ISTANA

Presiden Jokowi
Perkuat Sinergi
dengan IsDB

KABAR PMK

Mudik Aman,
Mudik Sehat

REVOLUSI MENTAL

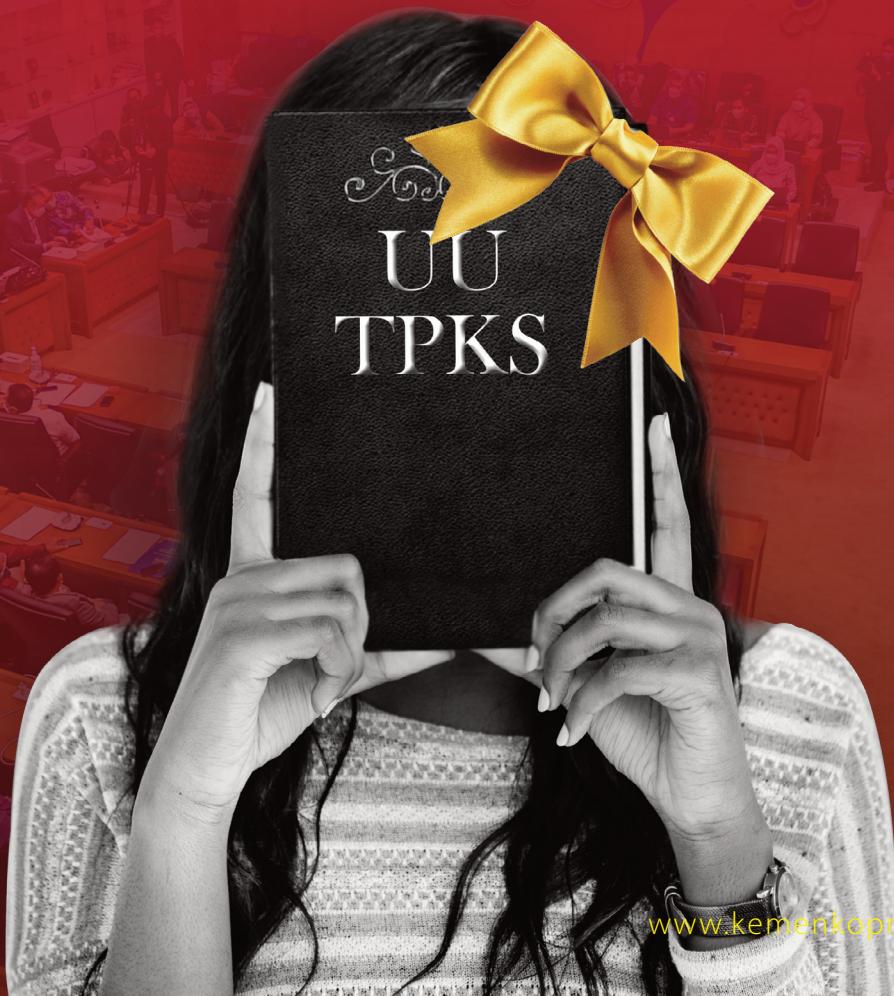
Maudy Ayunda:
Saya Excited,
Ini Momentum Bersejarah

BRAFOPMK

Edisi 11/April/IV/2022

Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

UU TPKS KADO ISTIMEWA HARI KARTINI



UU
TPKS

www.kemenkopmk.go.id

BRAFOPMK

Kartini

Inspirasi Perubahan
Menjawab **Kesetaraan**
dan **Tantangan Masa Depan**



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Selamat
Hari Kartini 21 April 2022



www.kemenkopmk.go.id



@kemenkopmk



kemenkopmkri



@kemenko_pmk



kemenkopmk

DAFTAR ISI

Edisi 11/April/IV/2022



Presiden Jokowi Perkuat Sinergi dengan IsDB

6

Kado Istimewa Hari Kartini

16



22

Sejarah dan Makna Halalbihalal

HALALBIHALAL ternyata memiliki sejarah sendiri di Indonesia. Tradisi ini merupakan tradisi asli Indonesia yang tak dapat ditemukan di negara-negara lain. Nah, seperti apa sejarah Halalbihalal dan apa maknanya?



24



28

Mudik Aman, Mudik Sehat

Menko PMK Muhamdij Effendy bersama dengan Menhub Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi pusat pemberangkatan arus mudik di DKI Jakarta.



Maudy Ayunda: Saya Excited, Ini Momentum Bersejarah

Pembentukan Kurikulum Pendidikan Harus Libatkan Banyak Aspek



42

EDITORIAL

Edisi 11/April/IV/2022

Hadiah Bagi Seluruh Perempuan Indonesia

DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

UU ini sudah melewati perjalanan panjang sejak digagas 10 tahun lalu. Tercatat, RUU ini awalnya bernama RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (P-KS). Namun, dalam perjalannya beliau ini berubah nama menjadi RUU TPKS.

Menilik sejarah ke belakang, RUU TPKS sudah beberapa kali masuk Prolegnas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan pernah turut mendorong agar RUU ini segera disahkan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 menyatakan RUU P-KS digagas sejak 2012, tapi baru direalisasikan pada awal 2014.

Komnas Perempuan juga menilai, kehadiran RRU tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah kekerasan seksual. Sehingga hal ini menjadi urgensi tersendiri untuk segera diselesaikan.

Sebanyak 70 anggota DPR mengusulkan agar RUU P-KS ini dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2016. RUU P-KS direncanakan terdiri atas 12 bab, meliputi pencegahan, penanganan korban, penindakan, dan rehabilitasi.

Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, serta para pakar hukum pidana.

9 September 2021, RUU PKS berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Setelah perjalanan lebih dari 10 tahun, Presiden Jokowi berharap RUU TPKS segera disahkan. Jokowi meminta substansi dalam UU tersebut fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual.

Pengesahan UU TPKS menjadi sejarah baru, untuk itu kami Redaksi BrafoPMK mengangkat fokus utama untuk edisi ini dan melihatnya sebagai hadiah istimewa di Hari Kartini, sekaligus kado berharga bagi seluruh perempuan di Indonesia. Kami persembahkan "UU TPKS, Kado Istimewa Hari Kartini". □



Pembina:

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pengarah:

Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Penanggung Jawab:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi

Redaktur Pelaksana:

Danang A. Ichwan

Tim Redaksi:

Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Dwi Prasetya, Puput Mutiara, Novrizaldi, Mega Hartati

Ahli Tata Letak/Produksi:

Rendy Febrianto, M.Yusuf Abdullah, Kristian Suryatrina, Moch. Ragil

Sekretariat Redaksi:

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Lantai 9 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10100
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id

Redaksi menerima artikel atau tulisan juga foto. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya.



"Transisi energi akan mengubah banyak hal: perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis dan lainnya. Karena itu, dibutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi tantangan saat ini dan tantangan di masa depan agar transisi energi rendah karbon yang adil dan merata dapat terlaksana dengan baik,"

Ir. Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Republik Indonesia



□ Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres



"Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang berpandangan maju dan produktif, sehingga akan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Sedangkan pelatihan vokasi merupakan bentuk pendidikan yang implementatif dan tidak kalah penting bagi dunia kerja,"

K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden (Wapres) RI

□ K.H. Ma'ruf Amin. Foto: BPMI Setwapres



"Tahun 2024 presiden menargetkan 0 (nol) persen untuk miskin ekstrem. Maka dari itu kita harus kerja habis-habisan untuk turun ke lapangan langsung, jangan gengsi, jangan jaga image, dan jangan cari pencitraan. Kita harus kerja tulus,"

Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)



□ Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK

ISTANA

Presiden Jokowi Perkuat Sinergi dengan IsDB



■ Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres

BRAFOPMK - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Islamic Development Bank (IsDB), Mohammed Al Jasser, bersama delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 Maret 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Al Jasser antara lain menyampaikan dukungannya terhadap presidensi G20 Indonesia.

"Kami membahas presidensi G20 dan memberi tahu mereka betapa bangganya kami dengan presidensi Indonesia. Kami di sini juga untuk mendukung dengan segala cara yang memungkinkan untuk membuat presidensi ini sangat sukses terlepas dari semua tantangan yang dihadapi," ujar Presiden Al Jasser dalam keterangan selepas pertemuan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut mendampingi Presiden menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan atas kehadiran Presiden Al Jasser di Indonesia. Presiden Jokowi juga berharap hubungan Indonesia dengan IsDB akan makin kuat.

"Ini adalah kunjungan beliau pertama kali di Indonesia sebagai Presiden Islamic Development Bank dan juga mengharapkan hubungan yang makin erat dan juga makin kuat antara Indonesia dengan Islamic Development Bank," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan, keduanya juga membahas kerja sama dalam sejumlah program prioritas pembangunan Indonesia. Menurut Sri Mu-

lyani, banyak prioritas pembangunan yang disusun dalam kerangka kerja sama antara IsDB dengan Indonesia yang mencakup berbagai bidang.

"Pertama, masalah pendidikan, Islamic Development Bank banyak sekali memberikan pembangunan kampus-kampus universitas di Indonesia. Juga di bidang kesehatan, selama pandemi ini Islamic Development Bank juga mendukung di dalam pengadaan vaksin dan juga dalam penanganan pandemi," jelasnya.

Selain itu, dibahas juga kerja sama prioritas pembangunan lainnya yaitu di bidang infrastruktur, termasuk dalam hal ini untuk energi baru terbarukan atau keuangan berkelanjutan yang merupakan suatu tantangan besar.

"Bapak Presiden menyampaikan potensi-potensi *renewable* di Indonesia dan isu *climate change* yang sangat penting dan Islamic Development Bank juga melihat ini sebagai *priority*," imbuh Sri Mulyani.

Hal lain yang dibahas dan sesuai dengan agenda G20 yaitu mengenai teknologi digital yang juga dipandang sebagai prioritas oleh Presiden Islamic Development Bank. Dalam konteks ini, lanjut Sri Mulyani, Presiden Al Jasser sudah melakukan kunjungan ke berbagai proyek, termasuk di Universitas IMERI, untuk melihat riset yang potensial yang bisa dibagikan pada negara-negara anggota Islamic Development Bank yang lain.

"Beliau juga menyampaikan mengenai dukungan Islamic Development Bank untuk presidensi G20 Indonesia yang sekarang ini sedang menghadapi situasi di dalam G20 yang sangat menantang. Jadi beliau juga tadi sangat mendukung agenda kita yaitu mengenai masalah *digital technology, sustainable finance*, dan *joint health and finance architecture*," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggitto Abimanyu. ■



□ Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Foto: BPMI Setwapres

Digitalisasi Jadi Kunci Hadapi Era Disrupsi Teknologi dan Informasi

BRAFOPMK - Digitalisasi merupakan aspek yang sudah melekat dengan kehidupan masyarakat masa kini. Bahkan digitalisasi telah mendisrupsi seluruh aspek, tidak terkecuali aspek pertanian. Untuk itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang dinamis, diperlukan adanya adaptasi dan juga semangat untuk terus berinovasi dalam menghadapi era disrupsi teknologi dan informasi.

"Masyarakat harus dapat beradaptasi serta berinovasi, sementara pemerintah terus berupaya memfasilitasi dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, serta menyediakan berbagai program pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia," ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pada acara Peresmian Peluncuran Aplikasi Lapak Abah – Ojek Desa dan Santri Digitalpreneur di Kantor Bupati Purwakarta, Jalan Ganda Negara Nomor 11A, Nagri Kidul, Purwakarta, Jawa Barat, Senin (28/03).

Wapres menyadari jangkauan internet yang belum merata di seluruh pelosok negeri menjadi kendala, khususnya menghadapi era keterbukaan informasi yang serba digital. "Saya memahami bahwa belum meratanya jangkauan internet adalah kendala yang harus segera diatasi, karena kebutuhan untuk terkoneksi secara digital pada kehidupan kita saat ini tidak dapat ditawar lagi," jelasnya.

Namun, hal tersebut menurut Wapres tidak mengu-

rangi langkah pemerintah dalam mengerakkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam pemulihan ekonomi nasional, dengan memanfaatkan potensi pertanian dan pemberdayaan UMKM. "Pemerintah terus mengupayakan pemulihan perekonomian nasional, antara lain dengan mengerakkan ekonomi perdesaan, khususnya dengan memanfaatkan potensi pada sektor pertanian dan pemberdayaan UMKM," tuturnya.

Wapres juga terus mendorong adanya peluang pengembangan UMKM masyarakat, termasuk di pondok pesantren, melalui beragam inovasi dan pengembangan teknologi. "Saya juga mendengar adanya aplikasi Jekdes (Ojek Desa), yang menyediakan transportasi *online* untuk membantu aktivitas perekonomian di pedesaan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru," ujar Wapres.

Lebih jauh, Wapres berharap adanya usaha yang dilakukan oleh para santri di pesantren atau Santri Digitalpreneur dapat memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya meningkatkan fungsi pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, namun juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengharapkan program Santri Digitalpreneur dapat memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, menuju cita-cita penguatan ekonomi umat," pungkasnya. ■



VAKSINASI BOOSTER DI TERMINAL SEBELUM MUDIK LEBARAN

Sejumlah warga antre untuk vaksinasi COVID-19 dosis ketiga (*booster*) di posko vaksinasi Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (17/4/2022). Posko tersebut bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan mudik Lebaran 2022 mendatang sekaligus sebagai upaya antisipasi penularan COVID-19. *ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra*



MUDIK GRATIS

Warga antre mendaftar mudik gratis angkutan Lebaran di Dinas Perhubungan Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/4/2022). Kementerian Perhubungan membuka pendaftaran mudik gratis tahap kedua pada 18-24 April 2022 dengan menyediakan 336 bus dan kuota 10.080 penumpang untuk 11 kota tujuan keberangkatan ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. *Foto: ANTARA FOTO/Arif Firman-syah*



WARUNG SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN

Warga antre untuk menerima paket makanan berisi nasi dan lauk pauk serta minuman di Warung Sedekah, Jalan Sunan Kudus, Kauman, Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (16/4/2022). Warung Sedekah yang buka setiap hari saat bulan Ramadhan tersebut menyediakan ratusan paket makanan yang dibagikan secara gratis kepada warga kurang mampu untuk berbuka puasa. *Foto: ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho*

PENUKARAN UANG JELANG LEBARAN

□
Warga menerima uang baru yang ditukarkan pada mobil kas keliling Bank Indonesia (BI) di Pasar Koja Baru, Jakarta Utara, Rabu (13/4/2022). Setelah dua tahun vakum akibat pandemi COVID-19, BI kembali membuka layanan penukaran uang rupiah baru melalui mobil kas keliling yang berada di 5.013 titik yang meliputi 453 titik penukaran di wilayah Jabodebek dan 4.560 di luar wilayah Jabodebek hingga 28 April mendatang.

*ANTARA FOTO/
M Risyal Hidayat*



NEWS FLASH

Jokowi Ambil Sumpah Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027



□ Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan tahun 2022-2027. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4/2022) **Foto: BPMI Setpres**

BRAFOPMK - Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan tahun 2022-2027. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/04/2022).

Pelantikan anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Dalam keterangannya selepas pelantikan, perwakilan anggota KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari persiapan jelang Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh anggota KPU periode sebelumnya. "Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan Peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai rencana, jadwal yang telah ditentukan," ucap Hasyim.

Senada, perwakilan anggota Bawaslu, Rahmat Bagja juga berharap Peraturan KPU dapat segera disahkan sehingga pihaknya dapat segera menyusun Peraturan Bawaslu dalam mengawasi seluruh proses tahapan pemilu. Selain itu, menurut Rahmat, Bawaslu

jug akan menyusun dan memperbaiki standar tata laksana pengawasan pemilu. "Kami bersama-sama akan melakukan seluruh proses pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Juni ini," ujar Rahmat.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU periode 2017-2022 Ilham Saputra, dan Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Abhan. ■

Nama-nama anggota KPU yang dilantik yaitu:

1. Betty Epsilon Idrroos;
2. Hasyim Asy'ari;
3. Mohammad Afifuddin;
4. Parsadaan Harahap;
5. Yulianto Sudrajat;
6. Idham Holik; dan
7. August Mellaz.

Sementara itu, anggota Bawaslu yang dilantik yakni:

1. Lolly Suhenty;
2. Puadi;
3. Rahmat Bagja;
4. Totok Hariyono; dan
5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Tetap Waspada Meski Pandemi Terus Membuat

BRAFOPMK - Ramadhan tahun ini, kondisi pandemi Covid-19 cukup stabil dan konsisten membaik di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Pemerintah tetap waspada dan mengawasi perkembangan situasi terakhir melalui berbagai evaluasi yang dilakukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Dalam dua minggu terakhir ini Angka Reproduksi Efektif (R_t) Indonesia tetap berada di level 1,00. Hal tersebut menandakan bahwa laju penularan (transmisi) Covid-19 terkendali di semua pulau, termasuk di Pulau Maluku yang sebesar 1,02 namun terus menurun (membaik) angka reproduksi efektifnya.

Per 11 April 2022, kasus konfirmasi harian konsisten menurun yaitu sebesar 1.196 kasus, dan menurun signifikan sebesar 98,15% dari puncak kasus Omicron di 16 Februari 2022 yang sebanyak 64.718 kasus. Kemudian, kasus aktif tercatat sebanyak 69.849 kasus, turun 88,08% dari puncaknya di 24 Februari 2022 sebanyak 586.113 kasus.

Sedangkan, kasus kematian sebanyak 41 orang, turun 88,03% dari puncaknya di 8 Maret 2022 sebanyak 401 kasus.

“Secara umum di luar Jawa-Bali, Kasus Aktif di sebagian besar Provinsi sudah cukup rendah, dan terus mengalami tren penurunan kasus. BOR Covid dan Isolasi tertinggi di luar Jawa-Bali berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menunjukkan tingkat yang masih cukup rendah yaitu 99%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta Pusat, Senin (11/04/2022). ■



□ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022). Foto: Kemenko Perekonomian



□ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Jasa Kena Pajak (JKP) Terentu. Foto: Kemenkeu

Catat! Jasa Keagamaan Bebas PPN

BRAFOPMK - Sejak berlakunya tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% pada 1 April 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Penerbitan ketentuan ini setidaknya menyesuaikan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu.

“Untuk meluruskan, dalam UU PPN Jasa ibadah keagamaan adalah jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga ibadah umroh maupun ibadah lainnya tetap tidak dikenakan PPN. Namun dalam praktiknya, penyelenggara jasa perjalanan ibadah keagamaan juga memberikan jasa layanan wisata (tur) ke berbagai negara sehingga atas jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah tersebut dikenai PPN.” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor, Selasa(12/04).

Adapun rincian pengenaan PPN atas jasa perjalanan ibadah keagamaan dengan tarif 1,1% dikenakan kepada jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan, dengan tagihan yang dirinci antara perjalanan ibadah dan perjalanan ke tempat lain dikenakan tarif PPN sebesar 0,55%.

Untuk jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan, dengan tagihan yang tidak dirinci antara perjalanan ibadah dan perjalanan ke tempat lain dikenakan tarif PPN sebesar 0,55%.

Sedangkan untuk jasa perjalanan untuk ibadah umroh dan ibadah lainnya serta jasa keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian ktabah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan dimasukkan kepada golongan pengenaan Non-JKP. ■

NEWS FLASH

Hore... InaExport Diluncurkan, Fasilitasi Ekspor Tanah Air



■ Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga didampingi Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi membuka Soft Launching aplikasi InaExport yang dilaksanakan secara hibrida di Bogor, Jawa Barat, Senin (11/4/2022). *Foto: Kemendag*

BRAFOPMK - Pemerintah meluncurkan platform pelayanan satu pintu (*one stop service*) fasilitasi ekspor nonmigas InaExport dalam kegiatan bertajuk Soft Launch InaExport di Bogor, Senin (11/04).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk dorongan transformasi digital dengan mengikutsertakan ekspor dalam platform perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), acara daring, dan program pameran daring.

"Kementerian Perdagangan mengembangkan InaExport dengan tujuan menjadikannya sebagai platform pelayanan satu pintu (*one stop service*) fasilitasi ekspor nonmigas untuk menghubungkan dan mempromosikan pelaku usaha atau eksportir Indonesia ke buyer internasional. InaExport menawarkan keuntungan. Tidak hanya membantu penjualan dan penjualan, tapi juga pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk siap menghadapi pasar global," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam keterangan, Selasa (12/04).

Jerry mengungkapkan keuntungan bagi eksportir Indonesia dapat berupa informasi pelatihan dan informasi terbaru pameran dagang. Selain itu, juga para eksportir berpeluang besar untuk terdaftar dan ditemukan dengan mudah oleh *buyer* potensial di seluruh dunia.

"Keuntungan bagi buyer yaitu kemudahan mengakses katalog produk dari pemasok Indonesia yang terverifikasi, mengirim inkuiri atau permintaan pembelian hanya dengan satu klik," jelas Jerry. Lebih lanjut, Jerry mengatakan InaExport berusaha memberi kemudahan pengkinian data secara efektif dan efisien.

"Bersama dengan seluruh perwakilan perdagangan di luar negeri dan jaringan buyer, InaExport bertujuan mendukung kesinambungan bagi pertumbuhan bisnis dalam keadaan yang nyaman bagi kedua belah pihak," kata Jerry. Hingga saat ini, dalam sistem InaExport telah terdapat 11.650 pemasok terverifikasi, 6.121 produk, 534 informasi pasar, 27 kegiatan, dan 48 perwakilan internasional.

"Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah, turunnya. Jerry meyakini kondisi normal baru (*new normal*) menjadi momentum yang mampu mengakses ekonomi digital di Indonesia yang telah menunjukkan potensi yang cukup besar. Konsumen digital meningkat dari sebelum pandemi 69,5 persen menjadi 79,7 persen pada 2021. Di sisi lain, penjual digital juga semakin akrab dengan perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan ekosistem ekonomi digital telah berada di jalur yang benar. "Kontribusi ekonomi digital pada 2021 mencapai Rp632 triliun atau 4 persen dari pendapatan domestik bruto Indonesia. Meski angkanya relatif kecil, pertumbuhannya sangat cepat," tandanya. ■

Kopdar Bareng Driver Ojol, Menhub Ingatkan Soal Prokes



□ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama para pengemudi ojek online di Jakarta, Selasa (5/4/2022). Foto: Kemenhub

BRAFOPMK - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan kepada para pengemudi ojek online (ojol) agar melakukan vaksinasi dosis lengkap dan booster serta tetap disiplin menjalankan prokes, sebagai bentuk pelayanan prima kepada para pengguna jasa ojol.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat bertemu para pengemudi ojol dalam acara Kopdar Online bertema "Bersama Kita Silaturahmi Dan Peluncuran Jaket Mitra Pengemudi Grab", yang diselenggarakan Grab Indonesia di Jakarta, Selasa (5/4).

Menhub mengatakan, pemerintah telah berupaya menerapkan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia, termasuk di sektor transportasi.

Upaya utama yang dilakukan yaitu disiplin menerapkan prokes 3M yakni memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan, serta mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer, serta menggencarkan vaksinasi.

Menhub berharap mitra pengemudi ojol terus mendukung pemerintah dalam upaya mengendalikan pandemi. Selain itu, diharapkan juga semakin tercipta hubungan

yang saling menguntungkan antara mitra pengemudi ojol dengan perusahaan aplikator seperti Grab Indonesia, dan juga perusahaan aplikator lainnya. "Terus layani masyarakat dengan baik, apalagi di bulan Ramadhan seperti ini. Insha Allah rezekinya pasti ada," kata Menhub.

Pada kesempatan yang sama, President Grab of Indonesia, Ridzki Kramadibrata menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah mengendalikan Covid-19 dengan baik, sehingga semakin meningkatkan kinerja dari para mitra pengemudi.

"Orderan mulai kembali meningkat," ungkapnya. Ridzki juga menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan akses dan ruang kepada para penyandang disabilitas, orang tua tunggal, dan lansia, menjadi mitra pengemudinya.

Pada kegiatan Kopdar yang ketiga kalinya ini, juga dilakukan peluncuran jaket mitra pengemudi Grab yang diharapkan semakin meningkatkan semangat para mitra pengemudi. Turut hadir dalam acara tersebut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol Chryshnanda Dwilaksana. ■

GIAT SEREMONIAL



7
April
2022

Jakarta

Vaksinasi Booster Digencarkan di Kota-kota Berangkat Mudik

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Jakarta. *Foto: Humas Kemenko PMK*



31
Maret
2022

Jakarta

Orang Puasa dan Tidak Puasa Harus Saling Menghormati

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat mengisi acara Silaturahmi Keluarga Besar Kemenko PMK dalam Menyambut Bulan Ramadhan di Kantor Kemenko PMK, Jum'at (31/3/2022). *Foto: Humas Kemenko PMK*

4

April
2022

Ponorogo,
Jawa Timur



Reog Ponorogo Diusulkan ke UNESCO

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendy (ke empat kanan) bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (ke tiga kiri) saat berdialog di rumah dinas Bupati Ponorogo, Senin (4/4/2022).

Foto: Humas Kemenko PMK

8

Februari
2022

Pekanbaru,
Riau



Jelang Idul Fitri, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

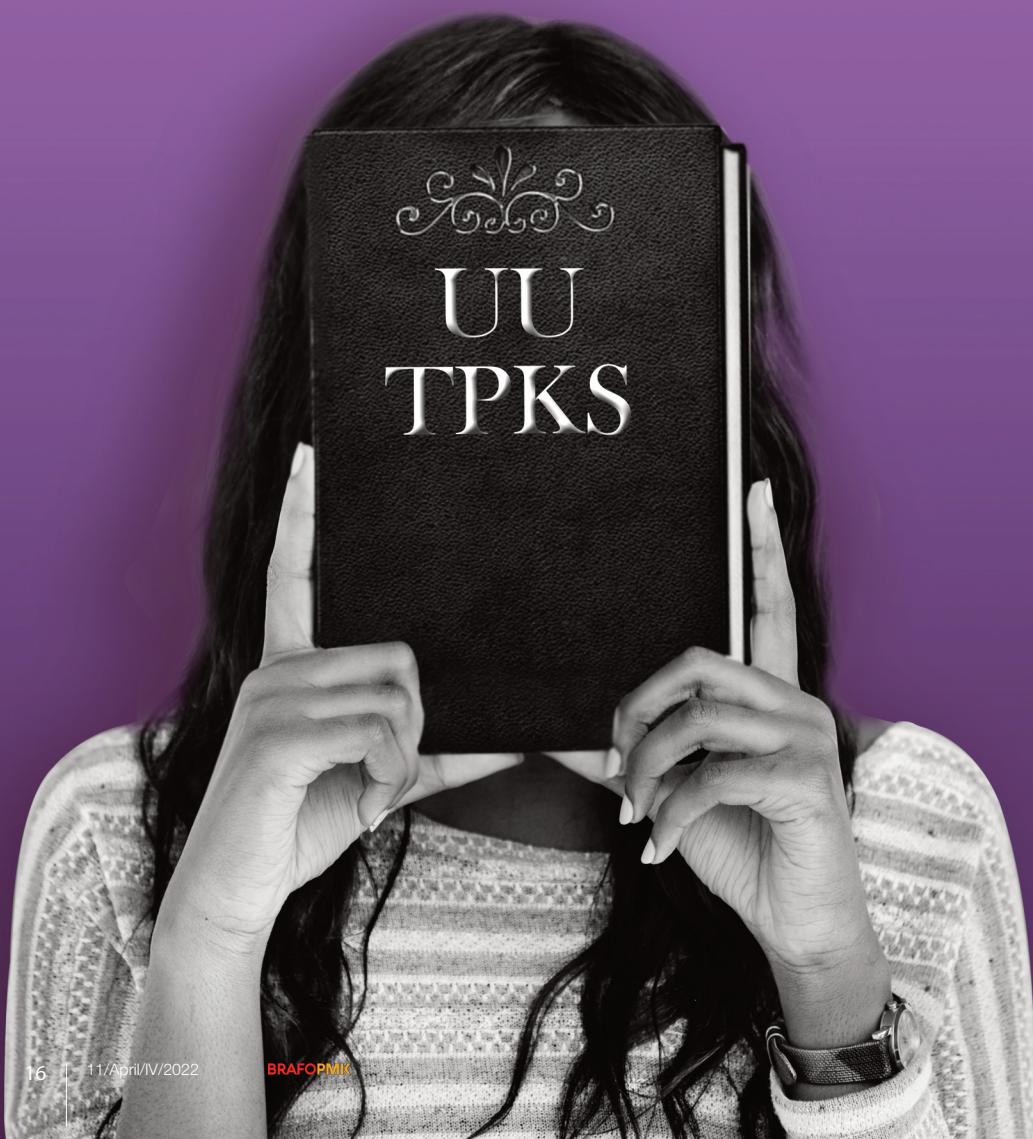
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendy saat meninjau penyaluran bansos di Kantor Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/4/2022). Foto: Humas Kemenko PMK

FOKUS UTAMA

KADO ISTIMEWA HARI KARTINI

Menko PMK: Prestasi Luar Biasa

Momentum Hari Kartini tahun ini terasa spesial bagi kaum perempuan Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya sah menjadi undang-undang. Momen bersejarah tersebut terjadi dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021–2022 di Jakarta, Selasa (12/04).



Kehadiran UU TPKS amat dinanti rakyat, terkhusus kaum hawa. Pasalnya, setelah lebih dari satu dasawarsa dibahas, regulasi yang mengatur secara komprehensif seputar tindak TPKS tersebut berakhir. "Happy Ending". UU TPS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.

"Inilah semangat dan roh perjuangan kita bersama, antara DPR RI, Pemerintah, dan Masyarakat Sipil, yang perlu terus kita ingat agar Undang-Undang ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan, khususnya bagi korban kekerasan seksual," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam keterangan persnya belum lama ini.

Menoleh ke belakang, perjalanan RUU TPKS memang menempuh proses yang amat panjang. Mulanya, RUU ini diinisiasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2012. Empat tahun kemudian, RUU ini berhasil masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI Tahun 2016 sebagai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Bintang juga mengapresiasi atas komitmen, sinergi, dan kolaborasi yang baik antara DPR RI, Pemerintah, dan dukungan penuh dari masyarakat. Menteri PPPA berharap UU TPKS nantinya akan implementatif dan memberikan manfaat, khususnya bagi korban kekerasan seksual.

Pemerintah, lanjut dia, telah melakukan rapat-rapat kerja secara intensif sejak akhir Januari hingga 11 Februari 2022 yang dikoordinasikan Menteri PPPA sebagai leading sector. Termasuk bersama dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM.

"Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas sinergi, kolaborasi, dan komitmen yang baik dari Pemerintah dan DPR RI, dan pendampingan yang luar biasa dari teman-teman masyarakat sipil. Akhirnya setelah penantian yang sangat panjang, RUU TPKS bisa kita sahkan," beber Bintang.

"Tentu kami harapkan nantinya undang-undang ini dapat menjadi undang-undang yang implementatif. Bicara soal implementatif, maka kita berbicara bagaimana

nantinya kita dapat mengatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, baik itu Peraturan Presiden, maupun Peraturan Pemerintah," tegas Bintang.

Menteri PPPA mengatakan langkah-langkah yang akan dilakukan lebih lanjut setelah RUU ini disahkan, yaitu dengan melakukan sosialisasi serta koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga. Demikian juga Pemerintah Daerah, penerapan undang-undang ini harus implementatif untuk kepentingan yang terbaik bagi korban.

Perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Prestasi Luar Biasa

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhamdijir Effendi mengatakan, disahkannya UU TPKS merupakan prestasi yang luar biasa bagi semua pihak yang terlibat. Sebab, UU TPKS baru disahkan setelah tujuh tahun terlunta-lunta proses pembahasannya.

"Pemerintah memandang perlu mempercepat undang-undang ini disahkan yang sudah 7 tahun terlunta lunta. Jadi ini prestasi luar biasa untuk kita semua," ujar Muhamdijir dalam sambutan peluncuran Permenko PMK nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Selasa (19/4).

Muhamdijir berharap undang-undang ini punya 'daya jotos' menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di Indonesia yang semakin memprihatinkan. Karenanya,

UU TPKS ini sangat ditunggu-tunggu dan dibutuhkan oleh banyak pihak. "Apalagi, fakta belakangan ini sangat banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang mencuat ke permukaan," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Muhamdijir menegaskan bahwa fenomena kekerasan seksual pada anak dan perempuan seperti fenomena gunung es. Ia meyakini masih banyak kasus yang belum terungkap selama ini ketimbang yang sudah ditemukan. "Karena perhatian Indonesia pada perlindungan anak dan perempuan merupakan hal yang baru. Belum lama. Kira-kira 20 tahun terakhir," pungkas dia. ■

FOKUS UTAMA

Hadiah Untuk Perempuan Indonesia



■ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kedua kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel (kiri) dan Lodewijk F Paulus (kedua kanan) saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). *Foto: DPR RI*

BRAFOPMK - Hari itu, tepatnya 12 April 2022, suasana di Ruang Sidang Paripurna DPR tampak lain dari biasanya. Ketua DPR RI, Puan Maharani, tampak emosional sesaat setelah dirinya mengetukan palu sidang. Mata nyanyi menitikan air mata yang kemudian diikuti suara sorak-sorak tepukan tangan dari peserta rapat.

Ya, momen tersebut terjadi setelah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) resmi disahkan DPR menjadi undang-undang. Sosok Puan memegang peran cukup penting di balik keberhasilannya 'mengegolkkan' aturan ini.

Sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Puan sudah mendorong dan menginsiasi RUU TPKS.

"Perkenankan pula kami atas pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Baleg DPR RI yang telah meyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar," ujar Puan diiringi riuh tepukan tangan oleh peserta sidang dan koalisi LSM perempuan yang hadir di ruangan.

Puan mengatakan pengesahan RUU TPKS menjadi UU merupakan hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. "Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. Apalagi di Hari Kartini," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu. "Hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa kita, karena UU TPKS adalah hasil kerja sama

bersama sekaligus komitmen bersama kita," lanjutnya. Puan mengapresiasi seluruh pihak yang ikut membantu mewujudkan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Masyarakat sipil pun dinilai sangat berperan dalam terealisasinya UU TPKS yang digagas sejak satu dekade lalu itu. Secara khusus, Puan memberi penghargaan untuk para aktivis, akademisi, dan tokoh lintas keilmuan yang ikut bersumbangsih agar substansi dari UU TPKS menjadi lebih konstruktif dan mewakili semua kepentingan. "UU TPKS bisa terwujud atas upaya bersama seluruh elemen Bangsa, termasuk masyarakat sipil yang terus menggaungkan, menyumbang ide dan pemikiran," kata Puan.

"Saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator PMK, Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM, atas segalanya peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan UU TPKS," ungkapnya.

Puan berpesan agar UU TPKS segera diterjemahkan menjadi aturan-aturan pelaksanaan teknis. Dengan begitu, kata Puan, semangat penyusunan UU TPKS dapat segera dirasakan wujud nyatanya. "UU TPKS dan aturan-aturan turunannya akan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan meyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual," sebut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. ■

Poin Krusial Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PR resmi mengesahkan RUU TPKS menjadi UU dalam rapat paripurna ke-19 pada Selasa (12/4) setelah enam tahun dibahas. UU TPKS terdiri dari 8 bab dan 93 pasal serta memasukkan 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksua. Berikut sejumlah poin-poin krusial yang terdapat dalam beleid ini.

1. Semua perilaku pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual

UU TPKS menyebutkan bahwa segala perilaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seorang dan terkait dengan keinginan seksual, dipidana karena pelecehan seksual non fisik.

2. Memberikan perlindungan kepada korban

Isi UU TPKS lainnya yaitu memberikan perlindungan kepada korban termasuk korban revenge porn atau penyebaran konten pornografi dengan modul balas dendam kepada korban. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan setidaknya ada sembilan tindak pidana kekerasan seksual.

3. Memberikan denda dan pidana terhadap pemakaian hubungan seksual

Pemakaian hubungan seksual juga termasuk tindak kekerasan seksual. Dalam UU TPKS, tindakan ini bisa dikenakan denda atau pidana. Pelaku tindak kekerasan seksual ini akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda Rp200 juta. Hal tersebut tertuang dalam UU TPKS pasal 6.

4. Pidana penjara atau denda untuk tindak pemakaian perkawinan

Pemakaian perkawinan termasuk didalamnya pemakaian perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan juga termasuk tidak pidana. Ketentuan tersebut tertuang dalam UU TPKS Pasal 10. Pelaku tindak pidana ini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.

5. Terdapat pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual

Di dalam UU TPKS Pasal 11, disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tidak hanya mendapat hukuman penjara dan denda, namun terancam mendapatkan pidana tambahan. Adapun pidana tambahan yang dimaksud, sebagai berikut: Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan. Pengumuman identitas pelaku. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pembayaran restitusi.

6. Ancaman pidana dan denda untuk korporasi yang melakukan TPKS

Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan individu saja, namun juga bisa dilakukan oleh pihak korporasi. Dalam pasal 13 UU TPKS diterangkan bahwa korporasi yang melakukan kekerasan seksual akan dikenakan denda sekitar Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

7. Keterangan saksi/korban dan satu alat bukti cukup untuk menentukan terdakwa

Biasanya untuk menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak kejahatan membutuhkan keterangan saksi/korban atau alat bukti yang lengkap. Namun, dalam UU TPKS, satu keterangan dan barang bukti sudah cukup untuk menentukan dakwaan terhadap seseorang.

8. Korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan

Restitusi yang dimaksud, antara lain: Ganti rugi atau kehilangan kekayaan atau penghasilan. Ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berhubungan langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

9. Korban berhak atas pendampingan

Selain berhak atas restitusi dan layanan pemulihan, dalam UU TPKS juga dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas pendampingan. Nantinya, UPTD PPAD atau lembaga penyedia layanan wajib memberikan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan korban serta membuat laporan kepolisian.

10. Tidak bisa menggunakan pendekatan restorative justice

Restorative justice adalah penyelesaian perkara yang menitikberatkan kondisi terciptanya keadilan dan keimbangan bagi pelaku dan korban. Hal ini berguna untuk menghindari upaya penyelesaian masalah dengan menggunakan uang. Tidak diperkenankan restorative justice harapannya para pelaku bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Infografis: Rifki Setiadi/BRAFOPMK

Catat! Syarat dan Aturan Lengkap Mudik Lebaran 2022

BRAFOPMK - Pemerintah kembali mengubah sejumlah persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) jelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Pelonggaran ini dilakukan dalam rangka menyambut mudik yang kini kembali diperbolehkan.

Ketentuan di atas diatur dalam Surat Edaran (SE) 16/2022 tentang Ketentuan Pelaku Perjalanan Orang

Dalam Negeri (PPDN) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diteken oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Sugiharyanto pada 2 April 2022.

Berikut daftar pengetatan prokes yang wajib dilakukan warga pemudik :

- 1. Wajib menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu.**

- 2. Mengganti masker secara berkala** setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan.

- 3. Mencuci tangan secara berkala** menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain.

- 2. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua** wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

- 1. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis lanjutan alias booster** tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

Infografis: Rifki Setiadi/BRAFOPMK



SELINGAN



□ Bung Karno dan KH Abdul Wahab Hasbullah tengah berdo'a untuk bangsa dan negara. *Sumber: www.pcnupati.or.id*

Sejarah dan Makna Halalbihalal

Salah satu tradisi yang selalu hadir saat Idulfitri yakni Halalbihalal. Biasanya Halalbihalal dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, saudara, dan kerabat. Pada acara Halalbihalal, tiap orang akan saling memaafkan dan bersalam-salaman.

Halalbihalal menjadi tradisi yang terus berkembang hingga saat ini. Halalbihalal juga berkembang menjadi ajang "open house", di mana sebuah rumah atau instansi mengundang orang untuk datang bersilaturahmi. Di masa pandemi, **open house** ditiadakan dan

Halalbihalal dilakukan secara daring.

Halalbihalal ternyata memiliki sejarah sendiri di Indonesia. Tradisi ini merupakan tradisi asli Indonesia yang tak dapat ditemukan di negara-negara lain. Nah, seperti apa sejarah Halalbihalal dan apa maknanya?

Arti Halal Bihalal

Halalbihalal memang terdengar seperti berasal dari bahasa Arab. Halalbihalal sebenarnya berasal dari kata sifat 'halal' dengan sisiyan 'bi' yang berarti 'dengan' (bahasa Arab) di antara 'halal'.

Namun, Halalbihalal sebenarnya bukan berasal dari Arab, melainkan merupakan tradisi yang dibuat di Indonesia.

Kata Halalbihalal bahkan sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, Halalbihalal berarti hal maaif-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, biasanya diadakan di sebuah tempat (auditorium, aula, dan sebagainya) oleh sekelompok orang. Halalbihalal juga diartikan sebagai bentuk silaturahmi.

Asal Usul Halal Bihalal Versi I

Ada sejumlah versi asal usul istilah Halalbihalal. Istilah Halalbihalal berasal dari kata 'alal behalal' dan 'halal behalal'. Kata ini masuk dalam kamus Jawa-Belanda karya Dr. Th. Pigeaud 1938.

Dalam kamus ini alal behalal berarti dengan salam (datang, pergi) untuk (memohon maaf atas kesalahan kepada orang lebih tua atau orang lainnya setelah puasa (Lebaran, Tahun Baru Jawa). Sementara halal behalal diartikan sebagai dengan salam (datang, pergi) untuk (saling memaafkan di waktu Lebaran).

Asal usul istilah Halalbihalal ini bermula dari pedagang martabak asal India di Taman Sriwedari Solo sekitar tahun 1935-1936. Pada saat itu, martabak tergolong makanan baru bagi masyarakat Indonesia.

Pedagang martabak ini dibantu dengan pembantu primbuminya kemudian mempromosikan dagangannya dengan kata-kata 'martabak Malabar, halal bin halal, halal bin halal'. Sejak saat itu, istilah halalbehalal mulai populer di masyarakat Solo.

Masyarakat kemudian menggunakan istilah ini untuk sebutan seperti pergi ke Sriwedari di hari lebaran atau silaturahmi di hari lebaran. Kegiatan Halalbihalal kemudian berkembang menjadi acara silaturahmi saling bermaafan saat Lebaran.

Asal Usul Halal Bihalal Versi II

Versi kedua asal usul Halalbihalal berasal dari KH Abdul

Wahab Hasbullah pada tahun 1948. KH Wahab merupakan seorang ulama pendiri Nahdatul Ulama. KH Wahab memperkenalkan istilah Halalbihalal pada Bung Karno sebagai bentuk cara silaturahmi antar-pemimpin politik yang pada saat itu masih memiliki konflik.

Atas saran KH Wahab, pada Hari Raya Idul Fitri di tahun 1948, Bung Karno mengundang seluruh tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul 'Halalbihalal.' Para tokoh politik akhirnya duduk satu meja.

Mereka mulai menyusun kekuatan dan persatuan bangsa ke depan. Sejak saat itu, berbagai instansi pemerintah di masa pemerintahan Bung Karno menyelenggarakan halalbihalal.

Halalbihalal kemudian diikuti masyarakat Indonesia secara luas, terutama masyarakat muslim di Jawa sebagai pengikut para ulama. Hingga kini Halalbihalal menjadi tradisi di Indonesia.

Makna Halal Bihalal

Halalbihalal tidak dapat diartikan secara harfiah dan satu persatu antara halal, bi, dan halal. Istilah 'halal' berasal dari kata 'halla' dalam bahasa Arab, yang mengandung tiga makna, yaitu *halal al-habi* (benang kusut terurai kembali); *halla al-maa* (air keruh diendapkan); serta *halla as-syai* (halal sesuatu).

Dari ketiga makna tersebut dapat ditarik kesimpulan makna halalbihalal adalah kekusutan, kekeruhan atau kesalahan yang selama ini dilakukan dapat dihalalkan kembali. Artinya, semua kesalahan melebur, hilang, dan kembali sedia kala.

Tradisi Halalbihalal Sudah Ada Sejak Masa Mangkunegara I

Tradisi serupa dengan Halalbihalal diyakini sudah ada sejak masa Mangkunegara I atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Saat itu, untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran dan biaya, setelah salat Idulfitri, Pangeran Sambernyawa mengadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana.

Pada pertemuan ini diadakanlah tradisi sungkem atau saling memaafkan. Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa itu kemudian ditiru oleh organisasi-organisasi Islam, dengan istilah halal bihalal.

■ Dari Berbagai Sumber

REVOLUSI MENTAL



□ Maudy Ayunda
Foto: ruangenergi.com

Ditunjuk Jadi Jubir Presidensi G20 Indonesia

Maudy Ayunda: Saya Excited, Ini Momentum Bersejarah

Artis Maudy Ayunda baru saja ditunjuk menjadi juru bicara (jubir) pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia. Penunjukan tersebut diakui Maudy disambutnya dengan gembira. Maudy menyambut baik kepercayaan Pemerintah dan ingin terlibat dalam momentum bersejarah kepemimpinan Indonesia dalam Forum G20 tahun 2022. Bahkan, Maudy mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam momentum bersejarah itu.

BRAFOPMK - "Indonesia sebagai tuan rumah hanya ada 20 tahun sekali. Kalau kita tidak terlibat sekarang, kapan lagi. Mari kita semua bergabung bersama berpartisipasi untuk menyukseskan momen ini," ungkapnya dalam Konferensi Pers Pengenalan Jubir Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia yang berlangsung virtual dari Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (31/03)

Menurutnya, ia selalu bersemangat mengikuti berbagai perkembangan G20, terutama karena Indonesia menjadi tuan rumah G20 tahun 2022. Maudy merasa terhormat dan dipercayakan menjalankan tugas menyebarkan informasi terkait Presidensi G20 Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan dunia aktif berpartisipasi menyukseskan perhelatan besar tersebut.

"Saya excited, ini momentum bersejarah. Ini kesempatan Indonesia mendorong dunia untuk pulih dan bersama-sama atasi tantangan ekonomi global. Makanya, tugas sejarah ini harus disambut suka-cita dan optimis. Tidak butuh waktu lama untuk saya setuju sebagai bagian dari tim juru bicara pemerintah Republik Indonesia untuk Presidensi G20," ujar alumnus Oxford University itu.

Maudy menjelaskan manfaat Forum G20 bagi bangsa Indonesia. Menurutnya dengan kedatangan ribuan delegasi akan membangkitkan ekonomi bangsa. "Kita harus bangga bahwa Indonesia berkesempatan untuk memimpin pembahasan tentang skenario menyelamatkan dunia keluar dari pandemi," tuturnya.

Menurut Maudy, krisis ekonomi yang berkepanjangan, perubahan iklim dan transformasi digital menjadi isu-isu penting di masa depan. Oleh karena itu, tema yang diusung Presidensi G20 Indonesia adalah *Recover To-*

gether, Recover Stronger.

"Indonesia mengajak seluruh dunia berkolaborasi, pulih bersama dari pandemi Covid-19 dan bersama tumbuh menjadi lebih kuat secara berkelanjutan. Tiga isu prioritas Presidensi G20 Indonesia adalah penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, serta transisi energi. Ketiga isu tersebut akan dibahas di semua sektor untuk nantinya menjadi modal besar untuk dunia agar pulih dan bangkit lebih kuat lagi," jelasnya.

Maudy menyatakan media massa dan sahabat G20 serta masyarakat Indonesia perlu terlibat dan bekerjasama untuk mengkomunikasikan perkembangan kegiatan dan informasi G20 agar Indonesia dan dunia merasakan manfaat Presidensi G20 Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

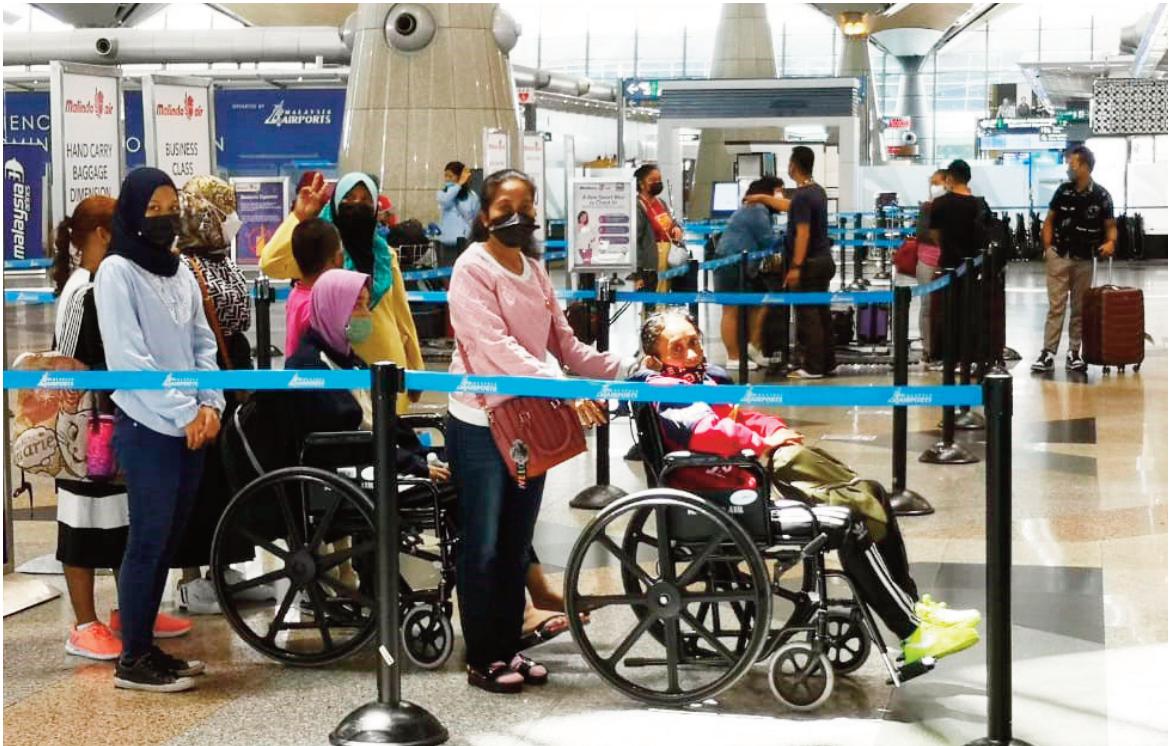
"Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia akan menjadi catatan sejarah yang membanggakan, hasil konkret dari pembahasan ketiga isu prioritas akan membawa perubahan kehidupan kita yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih atas penugasan yang diberikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate memperkenalkan publik figur sekaligus aktris ternama tanah air Maudy Ayunda sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia 2022. Menurutnya keberadaan Juru Bicara akan membantu masyarakat mengikuti rangkaian kepemimpinan Indonesia dalam Forum G20.

Menurut Menteri Johnny, Pemerintah berupaya memanfaatkan momentum Presidensi G20 untuk kepentingan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, guna menyukseskan kepemimpinan negara anggota G20, Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan promosi Presidensi G20 secara optimal. ■ (Kemkominfo)

INTERNASIONAL

Indonesia Kawal Kepulangan Delapan WNI dari Malaysia



□ Pemulangan delapan orang WNI dari Malaysia ke Indonesia (06/04/2022). Foto: Dok. Kemlu

BRAFOPMK - Wujudkan komitmen pelindungan WNI, KBRI Kuala Lumpur kembali memfasilitasi pemulangan delapan orang WNI dari Malaysia ke Indonesia (06/04/2022). Para WNI tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya ditampung KBRI Kuala Lumpur selama masa penanganan kasusnya.

Dari delapan WNI tersebut, tiga orang berhasil mendapatkan tuntutan gaji mereka, dua orang adalah WNI terlantar ibu dengan anaknya yang tuna grahita, dua orang WNI penderita sakit parah, dan seorang PMI yang memerlukan bantuan kepulangan.

Pada 31 Maret 2022, KBRI Kuala Lumpur juga telah memfasilitasi pemulangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta bagi 12 orang WNI, termasuk tiga orang anak-

anak. Seperti pemulangan-pemulangan sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan instansi terkait di Indonesia untuk penanganan kedatangan para WNI tersebut dan untuk transportasi ke daerah asalnya masing-masing.

Repatriasi WNI tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi para WNI di Malaysia. Proses repatriasi WNI di antaranya mencakup bantuan pembuatan dokumen perjalanan, pengurusan administrasi repatriasi di kantor Imigrasi Malaysia dan tes PCR Covid-19.

Selama bulan Januari-Maret 2022, KBRI Kuala Lumpur telah memfasilitasi sebanyak 111 orang WNI yang sebelumnya ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur dan sebanyak 36 orang WNI/PMI nonshelter. ■ Kemlu



□ Presiden Jokowi terima kunjungan resmi PM Papua Nugini James Marape, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Kamis (31/3/2022).
Foto: BPMI Setpres/Lukas

Kerja Sama Perdagangan dengan Papua Nugini Meningkat

BRAFOPMK - Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini (PNG), James Marape, dalam kunjungan resminya ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 31 Maret 2022. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah peningkatan kerja sama di berbagai bidang.

Salah satunya kerja sama di bidang perdagangan yang mengalami peningkatan sebesar 87 persen selama tahun 2021. Menurut Presiden Jokowi, peningkatan tersebut memberikan harapan dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi kedua negara pasca-pandemi Covid-19.

"Saya percaya masih banyak peluang yang dapat ditingkatkan. Untuk itu Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan," ujar Kepala Negara dalam keterangannya usai pertemuan berlangsung.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyambut baik peluncuran studi kelayakan untuk pembentukan perjanjian perdagangan frekuensi antara Indonesia dan Papua Nugini. Kepala Negara berpandangan bahwa pembentukan perjanjian investasi bilateral penting

dilakukan untuk memfasilitasi dan memberikan keamanan bagi investor kedua negara.

"Di bidang pertahanan, saya berharap implementasi perjanjian kerja sama di bidang pertahanan akan makin membuka kesempatan bagi kerja sama militer antara kedua negara. Hal ini termasuk potensi kerja sama mencakup industri pertahanan Indonesia," ucap Presiden.

Terkait kerja sama di bidang kesehatan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia siap mendukung upaya Papua Nugini untuk memperkuat ketahanan nasionalnya di bidang kesehatan melalui kemitraan antara otoritas obat dan makanan kedua negara. Selain itu, lanjut Presiden, perusahaan farmasi Indonesia juga telah menunjukkan minat untuk memasarkan produknya di pasar Papua Nugini.

Sementara itu, PM Marape dalam keterangannya turut menyambut baik undangan Indonesia kepada negara-negara Pasifik untuk ikut terlibat dalam KTT G20. PM Marape pun berharap Indonesia dapat menjalankan presidensi G20 dengan sebaik-baiknya.

"Kami berharap yang terbaik untuk Indonesia dalam memegang Presidensi G20 tahun ini. Kami juga berterima kasih Indonesia telah mengundang anggota Kepulauan Pasifik untuk ikut serta dalam KTT G20," ucap PM Marape. ■

KABAR PMK

Mudik Aman, Mudik Sehat



□ Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadir Effendy (kiri) bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (kanan) melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi pusat pemberangkatan arus mudik di DKI Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Foto: Humas Kemenko PMK

KEMENKOPMK - Menjamin kesiapan moda transportasi pada masa mudik Lebaran 2022, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadir Effendy bersama dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi pusat pemberangkatan arus mudik di DKI Jakarta. Ini mudik pertama setelah dua tahun dilarang karena pandemi. Pemerintah memutuskan cuti bersama 26 April-6 Mei.

Tinjauan ini dilakukan ke bandara dan stasiun untuk memastikan kesiapan masing-masing unit keberangkatan dalam melayani pemudik.

"Karena sudah dua tahun tidak mudik, Seperti yang disampaikan Menhub, hasil survei Kemenhub untuk pelaku mudik nanti jumlahnya diperkirakan diatas 80 juta orang. Maka dari itu kita berupaya jauh-jauh hari untuk menyiapkannya," ungkap Menko PMK saat konferensi pers dengan awak media pasca peninjauan di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dan Stasiun Pasar Senen, Kamis (7/4).

Sebelumnya Presiden telah menyetujui mudik diperbolehkan dan meminta instansi terkait agar pelaksanaan perjalanan mudik tahun ini diatur secara tepat dan ketat sehingga tidak menimbulkan risiko-risiko yang tidak perlu dan masyarakat bisa mudik dengan selamat sampai tujuan.

Terpisah, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, untuk perjalanan udara pihaknya bersama Menko PMK mereview apa yang sudah dipersiapkan oleh Airnav, Angkasa Pura II dan seluruh sektor yang ada di bandara dalam menghadapi arus mudik lebaran 2022 sehingga tagline "Mudik Aman Mudik Sehat" dapat dilaksanakan.

"Menurut hasil survei Kemenhub nanti untuk jumlah pemudik bisa diatas 80 juta orang sementara yang melalui jalur udara ada sembilan juta orang. Dan tentu saja bandara Soetta menjadi titik sentral bandara lain. Jadi harus dilaksanakan itu tagline kita," ungkap Menhub.

Menhub juga mengatakan, jumlah pesawat relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya oleh karena itu harus ada kompensasi dimana masa operasi pesawat lebih lama dibanding masa operasi bandara.

"Bahkan sudah disampaikan oleh Dirjen Angkasa Pura II saat ini durasinya sudah 24 jam sehingga pesawat itu rotasinya lebih banyak," ujar Menhub.

Hal lainnya, ujar Menhub, yang menjadi perhatian Presiden ialah pengontrolan terhadap safety dan kesehatan. Oleh karena itu pihaknya berpesan agar prokes dilaksanakan dengan baik, dua kali vaksin dan satu kali booster. "Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat untuk warga," tandasnya. ■



□ Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendy (kanan) bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kiri), di rumah dinas Bupati Ponorogo, Senin (4/4/2022). *Foto: Humas Kemenko PMK*

Menteri Muhamdij Bicara Soal Reog Ponorogo

KEMENKOPMK - "Kalau di Indonesia kan Reog Ponorogo sudah lama diakui sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2013. Selama kurun waktu 4 tahun berjalan pemerintah sudah melengkapi dan menyempurnakan semua persyaratan untuk diusulkan ke UNESCO," ungkap Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendy, baru – baru ini.

Muhamdij berusaha untuk mempercepat dan memastikan Reog agar segera diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tingkat UNESCO. Tercatat pada tanggal 18 Februari 2022, Reog Ponorogo sudah diusulkan langsung ke UNESCO. "Mudah-mudahan tidak ada kendala karena dalam persyaratan yang ditetapkan oleh UNESCO sudah sangat diperkuhi (kriterianya) oleh Reog," kata Menko PMK.

Mengenai proses yang cukup panjang, Menko PMK mengatakan hal tersebut karena banyaknya jumlah budaya Indonesia yang diusulkan ke UNESCO, semestinya pihak UNESCO membatasi hal tersebut. "Tidak boleh banyak-banyak karena di protes oleh negara lain. UNESCO juga kerepotan sekali menerima pengajuan dari Indonesia yang begitu banyak," tandasnya.

Salah satu ketua UNESCO, kata Muhamdij, pernah berkomentar bahwa dalam hal ekonomi dan militer, Ne-

gara Amerika-lah yang menjadi super powernya. Sementara super power budaya adalah Indonesia. "Nah salah satunya adalah Reog ini, yang juga kita kerjakan melalui Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, dimana ada persyaratan dan pembimbingan agar dari pihak stakeholder dalam hal ini masyarakat, komunitas, Pemerintah Ponorogo maupun Jatim betul-betul bisa menyiapkan dengan baik sehingga ketika diusulkan ke UNESCO itu tidak terkendala," jelas Muhamdij.

Sementara itu, Menko PMK mengungkapkan, dirinya belum mengecek lebih jauh klaim Malaysia atas Reog Ponorogo. Menurutnya, mengklaim suatu budaya sebetulnya tidak salah, artinya masing-masing negara boleh mengajukan. "Misalnya kita punya kulintang yang kita usulkan UNESCO, itu Negara Filipina juga melakukan klaim itu," ujar Menko PMK.

Adapun dalam kaitannya dengan Reog, Menko PMK menyebut, bukti sejarah atau legenda dan tradisi yang sudah mengakar merupakan bukti konkret bahwa Reog adalah seni yang berasal dari wilayah Jawa Timur bagian barat khususnya Ponorogo.

"Maka memang tidak akan ada ruangan untuk negara tertentu untuk bisa mengklaim bahwa dia juga memiliki kedekatan dengan budaya Reog ini. Itu yang akan kita lakukan," tegasnya. ■

KABAR PMK

Bikin Terobosan, Masalah dan Potensi Pemuda Jadi Perhatian Khusus



□ Femmy saat memimpin rapat Sinergi Pembangunan Kepemudaan Melalui Tindak Lanjut dan Implementasi Perpres No.43/2022 dan Perpres No.2/2022 di Hotel Grand Mercure Jakarta, Rabu (31/2/2022). *Foto: Humas Kemenko PMK*

KEMENKOPMK - Pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing. Pemuda punya potensi yang besar untuk ikut berkontribusi dalam setiap aspek pembangunan bangsa terutama dalam upaya memajukan perekonomian.

Hal tersebut diungkapkan langsung Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri mengatakan, saat memimpin rapat Sinergi Pembangunan Kepemudaan Melalui Tindak Lanjut dan Implementasi Perpres No.43/2022 dan Perpres No.2/2022 di Hotel Grand Mercure Jakarta, Rabu (31/2).

Munculnya Perpres No.2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021 - 2024, serta Perpres No.43 Tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan memberikan terobosan baru untuk mewujudkan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam perpres tersebut, pemuda mendapatkan kesempatan dan tempat utama untuk mengembangkan diri dan kunggungannya, salah satunya melalui kegiatan wirausaha untuk mengurangi angka pengangguran dan

mengurangi angka kemiskinan. Kedua perpres diharapkan mampu memberikan daya ungkit maksimal dalam peningkatan kualitas pemuda dan mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 57,67 pada tahun 2024.

"Ini merupakan terobosan untuk melakukan percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan di tanah air. Baik potensi maupun masalah para pemuda ini harus mendapat perhatian kita," tambahnya.

Femmy berharap para gubernur, bupati dan walikota mampu memahami dengan baik kedua Perpres tersebut dan mengimplementasikannya melalui program kegiatan di organisasi perangkat daerah di wilayahnya. Ditergatkan di tahun ini, sebanyak 50 persen dari masing-masing provinsi terbentuk tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan yang bertugas untuk menyusun Rancangan Aksi Daerah (RAD).

Sementara itu Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK Linda Restaningrum menegaskan bahwa sinergi lintas sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan peran pemuda, termasuk stakeholder lain yaitu institusi pendidikan, swasta, dan juga masyarakat. Utamanya, menyangkut dengan pengembangan serta pembangunan kepemudaan di lapangan, dimana salah satunya adalah kegiatan kewirausahaan.

"Di masing-masing kementerian/lembaga sebenarnya sudah memiliki program kegiatan untuk pengembangan kewirausahaan pemuda. Hanya, kalau ini bisa disinergikan tentu hasilnya akan lebih baik," ujar Linda. Sebagaimana diketahui, di masa Covid-19 ini kelompok usia pemuda antara 20-24 tahun menjadi kelompok yang paling terdampak (26,10%) dan berikutnya usia pemuda 25-29 tahun (23,75%). ■



□ Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi. Foto: Humas Kemenko PMK

Menghitung Hari Menuju ASEAN Para Games 2022

KEMENKOPMK - Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi menggelar rapat koordinasi sejumlah Lembaga dan kementerian. Mengingat, tersisa 117 hari lagi menuju penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022. Rapat ini bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian berbagai pending issue yang masih ada, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Persiapan ASEAN Para Games 2022, pada Senin (4/4).

Didik Suhardi menyampaikan rapat ini merupakan tindak lanjut Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden pada 22 Maret 2022. Didik memaparkan beberapa identifikasi beberapa pending issue strategis yang harus segera diselesaikan. "Di antaranya persoalan dukungan payung hukum, kesiapan venue, dukungan anggaran, peralatan pertandingan, transportasi, kesehatan, dan keamanan," ujar Deputi Didik.

Didik menyampaikan, terkait payung hukum, saat ini sedang dalam proses penyelesaian rancangan oleh Kemenpora bersama dengan Kemensetneg, Setkab, dan KL terkait lainnya. Di dalam payung hukum tersebut disiapkan didalamnya akan mengatur kepan-

tiaan, proses pengadaan, pendampingan, dan mekanisme pelaporan.

Kemudian, mengenai persiapan venue, disiapkan 14 venue yang tersebar di Surakarta, Karang Anyar, dan Sukoharjo yang masih membutuhkan renovasi minor, kecuali venue renang yang membutuhkan renovasi mayor. Kementerian PUPR akan segera melaksanakan survei kondisi venue saat ini untuk menentukan renovasi yang dilakukan.

Sedangkan mengenai dukungan anggaran, Didik menjelaskan, saat ini sedang disusun penganggaran yang seefisien mungkin termasuk untuk penyediaan peralatan yang diharapkan dapat menggunakan peralatan ex-PEPARNAS Papua 2021.

"Saat ini Tim Kemenko PMK dan Kemenpora juga masih melakukan identifikasi di lapangan mengenai kesiapan peralatan ex-PEPARNAS Papua 2021. Kemenkes, Kemensos, Kemenhub, TNI, dan POLRI juga siap memberikan dukungan untuk menyukceskan ASEAN Para Games 2022," pungkasnya. Sebagai informasi, rapat ini dihadiri oleh Sekjen NPC, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Perwakilan Setneg, Setkab, Kemenkes, Kemensos, Kemenhub, TNI, dan POLRI. ■

Ormas Miliki Peran Penting Wujudkan Demokrasi Inklusif



□ Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendy (kanan). Foto: Humas Kemenko PMK

KEMENKOPMK - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendy mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) atau *_civil society_* sangat berperan penting dalam menentukan jalannya demokrasi di Indonesia. Menurut Muhamdij, potensi ormas di Indonesia sangat besar. Data yang dihimpun Kemendagri per Desember 2019, jumlah ormas yang ada di Indonesia sekarang ini sudah capai 431.465 ormas.

Dari banyaknya ormas itu, kata Menko PMK, terdapat dua ormas terbesar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berbasis Islam. "Dapat kita bayangkan begitu besarnya potensi ormas dalam berkolaborasi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan efektif ini. Pendek kata ormas akan selalu memiliki peran yang besar dalam masa depan demokrasi di Indonesia," ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam forum *_Indonesia Civil Society Forum 2022_* dengan tema *_Advancing Inclusive Democracy in Indonesia_*, secara daring, pada Rabu (30/3).

Lebih lanjut, kata Menko PMK, kekuatan ormas sebesar di Indonesia belum tentu terjadi di beberapa negara besar yang menganut sistem demokrasi. Kekuatan masyarakat madani juga telah banyak membantu jalannya pemerintahan misalnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Peranan organisasi sosial kemasyarakatan ini sangat dirasakan ketika Indonesia menghadapi wabah Covid-19. Saya sebagai Menko PMK yang secara nomenklatur menjadi tanggung jawab di bidang PMK, saya berani katakan bahwa sharing ataupun sumbangan dari ormas ini saya kira diatas 30 persen," jelasnya. "Tanpa peranan ormas ini saya yakin penanganan Covid-19 tidak sebaik yang sekarang kita alami," imbuh dia.

Indonesia di satu sisi memiliki banyak kelebihan karena memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Hal ini bisa diartikan sebagai anugerah. Akan tetapi di sisi lain realitas ini bisa memicu terjadinya perpecahan, intoleransi, dan konflik sosial.

Karena itu, menurut Menko PMK, peran ormas sangat penting dalam hal mengembangkan pola pikir yang inklusif kepada masyarakat. Dalam hal ini menjunjung tinggi keberagaman, toleransi, tenggang rasa dan memahami bahwa tidak ada yang mayoritas dan minoritas.

"Pemahaman seperti ini harus dikembangkan di Indonesia agar semua orang tahu bahwa sebetulnya keanekaragaman di Indonesia ini harus dipahami secara lebih utuh. Dan peranan ormas dan media sebetulnya menjadi lebih penting untuk membangun semangat toleransi, inklusivitas, dan seterusnya," ucapnya. ■



□ Menko PMK Muhamdij Effendi (tengah) berfoto bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (ketiga kanan), Mendikbud dan Ristek Nadiem Makarim (ketiga kiri), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga (kedua kiri) dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kedua kanan) pada acara peluncuran Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Jakarta, Selasa (19/4/2022). *Foto: Humas Kemenko PMK*

Pemerintah Jamin Kesejateraan Anak Usia Sekolah hingga Remaja Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022

KEMENKOPMK - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meluncurkan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR). Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada anak usia sekolah dan remaja di Tanah Air.

RAN PIJAR menjamin kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja dalam kehidupan di sekolah hingga perlindungan kesehatan. Permasalahan-permasalahan yang melandasi peraturan tersebut antara lain terkait persoalan kesehatan dan gizi anak-anak di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdij Effendi menyebutkan, 32 persen anak usia sekolah dan remaja mengalami anemia. Sedangkan 58,3 persen anak mengalami aktivitas kurang dan pola makan yang tidak sehat.

"Peluncuran Permenko PMK sekaligus dalam rangka memperingati hari Kesehatan Sedunia yang jatuh tanggal 7 April 2022 yang lalu, yang bertema Our Planet Our Health yang bertujuan mengajak masyarakat menjaga bumi dan manusia agar tetap sehat," tegas Muhamdij dalam sambutannya di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (19/4).

"Anak usia sekolah dan remaja kita itu 41 persen. Anemia 32,0 persen, aktivitas kurang dan pola makan yang tidak sehat 58,3 persen. Satu dari 10 pemuda usia 15-24 tahun memiliki gangguan mental emosional, dan obesitas umur 7-12 sebanyak 12 persen. Ini berdasarkan data dari Rskesdas 2018," sambung Muhamdij.

Bahkan, Muhamdij menyebut 3,2 persen kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia menggunakan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). Hal tersebut merujuk data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) 2019.

"Kami berharap kepada seluruh pimpinan daerah dan juga kementerian terkait dan tentu saja lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga layanan sosial yang berkaitan dengan remaja dan usia sekolah ini bisa betul-betul saling bergandeng tangan bekerja dengan penuh *concern*," jelas Muhamdij.

Hadir dalam peluncuran Permenko PMK RAN PIJAR Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, serta Kepala Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. ■

Layanan Mobil X-Ray Pemeriksaan Tuberkolosis Diperluas



□ Layanan Mobil X-Ray. Foto: Kemenkes

BRAFOPMK - Kementerian Kesehatan akan memperluas layanan mobile X-ray untuk meningkatkan pelacakan kasus aktif TB di masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari percepatan penemuan kasus aktif TB, agar tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebutkan perluasan mobile skrining TB akan menyasar 7 provinsi diantaranya Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. "Hari ini kita sudah launching mobile X-ray, perluasan ini sudah dilakukan di beberapa tempat sehingga masyarakat bisa langsung di foto tanpa harus datang ke RS, dengan cara ini pasien bisa langsung diidentifikasi dan diobati lebih dini lagi," kata Wamenkes belum lama ini.

"Orang yang kontak langsung dengan penderita TB, orang dengan HIV, orang dengan DM, mereka-mereka ini sebagai salah satu target dari skrining TB," imbuhnya. Wamenkes menjelaskan penemuan kasus aktif melalui Mobile X-ray dilakukan dengan pemeriksaan menggunakan rontgen dada. Hal ini untuk melihat

apakah pasien memiliki indikasi menderita TBC atau tidak.

Apabila teridentifikasi TB, pasien langsung di tangani oleh petugas kesehatan untuk selanjutnya diberikan pengobatan.

Dikatakan Wamenkes, mobile ini mampu meningkatkan penemuan kasus aktif TB di masyarakat. Kapasitas petugas kesehatan dan kesiapan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit dalam melaksanakan diagnosis, pengobatan dan pencegahan mutlak diperlukan agar penanganan pasien bisa tuntas.

Layanan mobile X-ray pertama kali diinisiasi oleh Zero TB Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pelacakan kasus TB di wilayah-wilayah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo yang angka kasusnya cukup tinggi. Inovasi layanan kesehatan tersebut hadir sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan prevalensi TB di DIY sebesar 50% selama 5 tahun mendatang. ■



□ Ilustrasi Vaksin. Foto: ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Penerima Vaksin Janssen Bisa Dapat Vaksinasi Booster

BRAFOPMK - Vaksin COVID-19 jenis Janssen (J&J) merupakan salah satu vaksin yang menerima izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Untuk saat ini vaksin Janssen (J&J) ini diberikan baru kepada kelompok usia 18 tahun ke atas.

Vaksin Janssen (J&J) ini juga merupakan vaksin COVID-19 pertama dengan dosis tunggal, yang artinya meski mendapat satu dosis tapi dianggap sudah mendapat vaksin lengkap. Sehingga dalam Surat Edaran Dirjen P2P No. SR.02.06/II/1188/2022 tentang penambahan regimen vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (booster), penerima vaksin Janssen (J&J) dapat memperoleh vaksinasi booster jenis Moderna. "Bagi masyarakat yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin Janssen (J&J), maka sudah terhitung memperoleh vaksinasi lengkap. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan vaksinasi booster 3 bulan kemudian," ujar dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., Juru Bicara Kementerian Kesehatan.

Bagi Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki handphone, atau bahkan belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK), mekanisme penerima vaksin booster masih bisa dibantu petugas secara

manual, dengan menunjukkan kartu vaksin yang dicetak. Vaksin Janssen (J&J) sendiri sudah terdaftar dalam sistem sebagai dosis 1 dan 2 di seluruh Kabupaten/Kota dan petugas bisa melakukan pengecekan di dashboard KPCPEN.

"Mekanisme pendataan vaksinasi melalui Pcare sampai saat ini tidak ada permasalahan apabila penerima vaksin Janssen (J&J) akan melakukan vaksinasi booster. Lalu untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum, penerima vaksin Janssen (J&J) dianggap sama dengan pelaku perjalanan yang sudah mendapat dua dosis vaksinasi dengan jenis vaksin COVID-19 lainnya. Apabila belum mendapat booster maka dilengkapi dengan dokumen tes antigen negatif 1X24 jam atau tes PCR negatif dalam 3X24 jam terakhir," ujar Setiaji ST. M.Si, Chief of Digital Transformation Office Kemenkes.

Pemerintah terus meningkatkan cakupan vaksinasi ke seluruh warga Indonesia termasuk vaksinasi booster. Hingga hari ini (8/4) pukul 12.00 WIB, vaksinasi dosis 1 telah mencakup 197.313.563 (94,74%) masyarakat Indonesia, lalu dosis 2 mencakup 161.119.107 (77,36%) masyarakat Indonesia, dan cakupan dosis 3 berada di 25.945.875 (12,46%). ■

Menaker: THR Tidak Boleh Dicicil Lagi



□ Ilustrasi. Foto: berkeluarga.id/Envato

BRAFOPMK - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) 2022 melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan. SE ini disampaikan dalam konferensi pers Menaker pada tanggal 8 April di Jakarta.

"THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional. Tanpa dicicil, alias kontan," demikian Menaker menyatakan.

Menaker menegaskan bahwa THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap. "Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT berhak atas THR. Jadi jangan disempitkan cakupan penerimanya".

Posko THR yang disiapkan akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja ataupun pengusaha. Menaker meminta setiap pihak memanfaatkan posko ini. "Pokoknya kalau cuma ingin tanya-tanya soal THR pun kami siap melayani".

Dalam kesempatan ini secara khusus Menaker meminta kepada perusahaan yang tumbuh positif dan profitnya bagus agar memberikan THR lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerjanya.

"Bagi perusahaan yang mampu, tolong, berbagilah lebih banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan. Jika pun bukan dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk sembako. Agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik."

"Mari gotong rotong dengan pemerintah menaikkan daya beli pekerja. Tidak ada ruginya. Upah para pengusaha yang murah hati insya Allah akan besar pada akhirnya di akhirat nanti. Bisnisnya pun bakal jadi berkah karena didoakan terus oleh pekerjanya," demikian tutup Menaker Ida.■



□ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPP) Bintang Puspayoga. Foto: Kemen PPPA

Menteri Bintang Paparkan Poin Krusial RUU TPKS

BRAFOPMK - Usai 10 hari dalam pembahasan pemerintah bersama DPR RI sejak Maret, angin segar bagi hadirnya sebuah Undang-Undang yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual semakin kuat. Tepat pada Rabu, 6 April 2022 Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah pada Rapat Pembicaraan Tingkat Pertama telah menyelesaikan RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II pada Sidang Paripurna DPR RI untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPP), Bintang Puspayoga menuturkan perjalanan proses penyusunan RUU TPKS ini tidak ditempuh dalam waktu yang singkat. Pasang surut proses pembahasan RUU TPKS yang semula dinamakan RUU PKS telah berlangsung selama 6 tahun.

"Selama 6 tahun ini menjadi masa pembelajaran penting. Perjalanan ini membawa kami menemukan sebuah hal mendasar yaitu betapa krusial dan berharganya sebuah dialog. Dialog berperan besar dalam mengurai sekat-sekat dan membuat simpul-simpul titik temu," ungkap Menteri Bintang dalam kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh KemenPPPA untuk membahas isu-isu terkini seputar perempuan dan anak 'Media Talk' yang kali ini mengangkat tema "Tok! RUU TPKS Sepakat Diteruskan ke Sidang Paripurna DPR RI" Jumat (8/4).

Menteri Bintang menjelaskan tantangan serta hambatan yang ditemui di tahun-tahun sebelumnya oleh Ke-

menterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai leading sector dari tim pemerintah, justru dijadikan pemecut dalam merampungkan RUU TPKS. Memperkuat kerja sama dengan kementerian lain yang menjadi anggota tim pemerintah, belajar memahami pengalaman para pendamping korban, organisasi keagamaan, mahasiswa dan kaum muda serta organisasi pekerja, hingga memahami pandangan pihak-pihak yang menyatakan kontra terhadap RUU tersebut.

Menteri Bintang menggambarkan secara umum dalam RUU TPKS terdapat pengaturan 9 (sembilan) jenis TPKS yakni pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksplorasi seksual; perburukan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik serta TPKS lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pasal bridging dengan KUHP dan Undang-Undang lainnya. Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. RUU TPKS juga melakukan pembaruan hukum acara sebelum, selama dan setelah proses hukum.

Dalam RUU TPKS, Negara hadir memenuhi hak korban atas dana Pemulihan termasuk layanan kesehatan saat korban mendapat perawatan medis, dana Penanganan Korban sebelum, selama dan setelah proses hukum, termasuk pembayaran kompensasi untuk mencukupi sejumlah Restitusi ketika harta kekayaan pelaku yang disita tidak cukup.

Tidak hanya itu, RUU TPKS juga menjamin pemberian upaya pencegahan dan penanganan di wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), daerah konflik, daerah bencana dan di semua tempat yang berpotensi terjadinya TPKS. Pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam Pencegahan, Pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap TPKS, serta partisipasi keluarga dalam Pencegahan TPKS juga diajukan dalam RUU TPKS. ■

HUMANIORA



□ Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali. Foto: Kemenpora

Kemenpora Paparkan Soal 31 Cabor di SEA Games 2021

BRAFOPMK - Ketua tim review Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Prof. Dr. Moch. Asmawi kembali menjelaskan terkait alasan pihaknya memutuskan 31 cabang olahraga untuk diberangkatkan pada ajang multi event SEA Games 2021 yang akan digelar di Hanoi, Vietnam, 12-23 Mei 2022 mendatang.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil review dari tim yang terdiri dari para akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan sejumlah perguruan tinggi lainnya, praktisi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Tim review melakukan wawancara dengan pelatih, manajer dan pengurus cabang olahraga serta meli-

hat track record prestasi cabang olahraga tersebut di ajang-ajang olahraga terakhir yang diikuti baik single event maupun multi event.

"Kami menetapkan cabang olahraga itu berdasarkan hasil review. Review itu tidak hanya kami wawancara dengan cabang-cabang olahraga, tetapi kami juga mempunyai data dan mempunyai track record. Data itu multi event yang terakhir diikuti kalau enggak begitu kita juga melihat track recordnya di kejuaraan resmi," kata Prof. Dr. Moch. Asmawi saat diwawancara di Hotel Kimaya, Slipi Jakarta Barat, Kamis (7/4) malam yang didampingi anggota tim review lainnya.

Asmawi kemudian menjelaskan, bahwa pemerintah melalui Kemenpora telah menetapkan olimpiade sebagai sasaran utama dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) SEA Games hanya sasaran antara



menuju Asian Games dan Olimpiade. Sehingga kategori pertama cabang olahraga yang dikirim ke SEA Games yaitu 14 cabang olahraga yang masuk dalam DBON minus satu cabang olahraga karena tidak dipertandingkan pada SEA Games 2021 ini.

"Kurang lebih ada 14 cabang olahraga dalam DBON, tentunya yang nantinya mempunyai kans untuk meraih medali emas, perak dan perunggu, 14 cabang olahraga ini kami sudah mempunyai analisa prestasi semuanya," ujarnya.

13 cabang olahraga ini antara lain Angkat Besi, Atletik, Balap Sepeda, Bulu Tangkis, Dayung (Kano/Kayak-Perahu Naga), Rowing, Karate, Menembak, Panahan, Pencak Silat, Renang, Senam, Taekwondo dan Wushu.

Kedua, yakni cabang olahraga yang tidak masuk dalam DBON. Namun dinilai memiliki potensi meraih medali dengan jumlah 18 cabang olahraga.

"Ada 18 cabang olahraga yang non DBON. Namun ada potensi emas dan perak jadi kita berangkatkan. Kami tidak langsung menyetujui itu, karena kami mreview lagi dengan tim review baik itu review dengan tim DBON atau tim dari Kementara maupun review dengan tim yang ada di NOC atau KOI," ujarnya.

Adapun 18 cabang olahraga non DBON ini antara lain, Tinju, Voli Indoor, Voli Pantai, Boling, Catur, Jujitsu, Judo, Tenis, Triathlon, Sepak Takraw, Kickboxing, Sepak Bola, E-sport, Anggar, Basket, Gulat, Selam, Vovinam dan Golf.

Sementara itu, Asmawi menjelaskan ada 14 cabang dalam SEA Games Hanoi 2021 Indonesia tidak berpartisipasi atau tidak kirim atletnya. Karena hasil review dini-lai tidak memiliki potensi prestasi atau medali. "Kita tidak berangkatkan karena tidak mempunyai jejak prestasi dan tidak berpeluang meraih medali pada SEA Games 2021 yang akan datang. Itu adalah pesan dari pemerintah yang tidak bisa ditawar, kenapa karena hulunya adalah olimpiade," jelasnya.

Adapun 14 cabang olahraga tersebut antara lain, Bola Tangan Indoor, Bola Tangan Pantai, Dansa, Petanque, Kurash, Futsal, Biliar, Tenis Meja, Muaythai, Xiangqi, Loncat Indah, Senam Ritmik, Senam Aerobik, Binaraga dan Sepakbola Putri. "Kami sudah mengantongi itu, data yang nomor satu yang kami punya," tegasnya.

Meskipun menjadi sasaran antara dan atlet yang dikenakan tidak sebanyak saat SEA Games 2019 di Manila Filipina, Asmawi dan tim review memiliki harapan agar kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 ini menjadi juara umum di cabang olahraga masing-masing.

"Kita harapkan cabang olahraga itu menjadi juara umum, lebih baik dari kemarin. Karena bagaimana pun juga saya yakin mereka (negara lain) juga melakukan hal yang sama karena lagi ada covid. Cabang kita harapkan menjadi juara umum di cabang masing-masing," harapnya

Terkait adanya rencana keberangkatan mandiri dari beberapa cabang olahraga yang tidak berangkatkan pemerintah, Asmawi mengatakan bahwa pemerintah hanya memberangkatkan 31 cabang olahraga yang sudah ditetapkan dengan total 738 orang kontingen dengan rincian 476 atlet, 207 ofisial dan tenaga pendukung 55 orang.

"Ini tanggung jawab pemerintah, bagaimana pun juga ini kebijakan pemerintah. Jadi sudah diputuskan yang mandiri ini tidak diberangkatkan," katanya.

Terkait adanya beberapa cabang olahraga yang melakukan protes karena tidak diberangkatkan di SEA Games, Asmawi menegaskan bahwa pihaknya berdasarkan data dan track record prestasi. Sehingga cabang olahraga yang berprestasi yang dikirim, karena hal ini menggunakan anggaran negara ditengah fokus pemerintah dalam memulihkan ekonomi pasca pandemi. "Yang kita berangkatkan ini ada rekam jejak prestasi. Jadi ada kategori emas dan perak," jelasnya. ■

SENAYAN

Pembentukan Kurikulum Pendidikan Harus Libatkan Banyak Aspek



□ Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Keuangan (Korinbang) Rachmat Gobel. Foto: DPR RI

BRAFOPMK - Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk memperhatikan berbagai aspek dalam menyusun kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu catatan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar yang diselenggarakan secara virtual, Senin (28/3/2022). Pada rapat tersebut, Panja Kebijakan Kurikulum menerima masukan dari para pakar pendidikan, pelaku pendidikan, hingga pakar hukum terkait dengan penyusunan kebijakan kurikulum.

"Mendorong Kemendikbudristek RI menyusun kebijakan kurikulum yang memperhatikan keragaman kompetensi guru, potensi/kemampuan peserta didik, kondisi geografis dan kesiapan sarana dan prasarana," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat membacakan laporan singkat RDPU. RDPU ini dihadiri sejumlah pakar, di antaranya Roberia (Pakar Hukum), Dinn Wahyudin (Guru Besar Pengembangan Kurikulum UPI), Mulyasa (Pakar Kurikulum), Azyumardi Azra (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Ketua Asosiasi Guru Besar Indonesia, dan Ketua Umum PGRI.

Senada dengan catatan rapat, Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menilai perumusan kurikulum harus melibatkan banyak pihak dengan banyak hal yang harus diperbincangkan. "Kita tidak anti kok dengan perubahan, tidak anti perkembangan kurikulum, tetapi harus benar-benar melibatkan banyak pihak. Pertimbangan hukum, sosiokultural, tantangan zaman ke

depan, kondisi eksisting guru-guru kita, sarana dan prasarana dan berbagai hal lain termasuk sistem pemerintahan kita, otonomi daerah dan pusat dan daerah yang juga harus kita perhatikan," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hetifah Sjaifudin juga mengingatkan, transformasi pendidikan melalui perubahan kurikulum harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, semua yang terkait dengan transformasi tidak boleh semata-mata dilaksanakan karena pertimbangan timeline politik.

"Kalau kita bicara soal transformasi gitu ya atau kebijakan, tentu bukan hanya sistemnya yang bagus, tetapi tadi kesiapan kita untuk bersama-sama ya. *Culture* dan juga kesiapan dari semua yang menggunakan dan terdampak dari perubahan ini. Jadi kita semua juga berharap bahwa suatu transformasi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan cermat, dengan hati-hati dan tentu saja bukan semata-mata pertimbangan politis gitu," ungkap Hetifah.

Selain menyoroti terkait keterlibatan pihak lain pada penyusunan kebijakan kurikulum, para pakar juga menyinggung perlunya evaluasi kurikulum yang pernah atau sedang berjalan untuk membuat rancangan kebijakan kurikulum baru. Dibahas juga dalam rapat ini perlunya landasan hukum bagi penyusunan kebijakan kurikulum. ■



□ Sirkuit Mandalika. Foto: Instagram @motogp.mandalika

BP2MI Diminta Tetapkan Regulasi Pelaksanaan Program JKN

BRAFOPMK - Komisi IX DPR RI meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk segera menerbitkan peraturan Kepala Badan terkait penyusunan dan penetapan regulasi teknis guna mendukung pelaksanaan program JKN bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala BP2MI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2022). Komisi IX DPR RI juga meminta BP2MI memberikan sosialisasi kepada CPMI atau PMI tentang kewajiban mengikuti program JKN. "Serta memberikan perlindungan jaminan kesehatan CPMI atau PMI melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan di negara tujuan penempatan," kata Ansory.

Terkait penyelesaian perpanjangan kontrak kerja PMI dan penyelesaian MoU dengan Negara Malaysia dan negara penempatan lainnya, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah menjamin pemulangan PMI dari Negara Malaysia dan Negara penempatan lainnya yang masih dalam proses

pemulangan pada tahun 2022 dengan aman dan lancar sampai daerah asal. "Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka penyelesaian MoU sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Sementara terkait kesiapan pemerintah dalam penempatan PMI ke negara tujuan penempatan, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah memprioritaskan pelatihan peningkatan keahlian dan keterampilan melalui LPK swasta dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan yang berstandar sertifikasi internasional bagi CPMI.

Komisi IX DPR RI juga meminta BP2MI Mewujudkan biaya penempatan PMI sesuai dengan pasal 30 ayat (1) UU PPML; Menempatkan PMI pada pekerjaan di negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati; Mengawasi pelaksanaan isi perjanjian kerja yang ditandatangani PMI dengan pemberi kerja di negara tujuan penempatan. Serta membuat mekanisme pelaporan yang memudahkan CPMI dan PMI untuk memperoleh penyelesaian kasus yang dihadapi atau menghindari dari permasalahan. ■

OPINI

Pentingnya “Servqual” untuk Mewujudkan Desa Wisata yang Maju dan Mandiri

Oleh : **Hudi Santosso**

Penulis adalah Dosen Prodi Komunikasi, Sekolah Vokasi, IPB University



Desa Benteng sudah layak untuk menerima dan menyambut kunjungan wisata dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Diharapkan dengan dibukanya desa wisata ini dapat membuka lapangan kerja baru dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat akibat dari wabah pandemic Covid-19.

Untuk menuju desa wisata yang maju dan berkembang maka diperlukan keterlibatan dari masyarakat desa Benteng melalui dua lembaga. Lembaga pengelola yang kesemuanya berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat yaitu pokdarwis (kelompok sadar wisata) yang di dalamnya pelaku wisata dan Bumdes. Pokdarwis merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Keberadaan Pokdarwis menjadi penting karena dapat membantu dalam melakukan sosialisasi dan promosi mengenai desa wisata dengan memanfaatkan berbagai platform media.

Fungsi Bumdes sebagai badan usaha turut membidangi desa wisata, harus sejalan dengan koordinasi pokdarwis desa. Hal ini bertujuan agar terjadi kesinambungan antara program paket wisata yang telah digagas oleh pokdarwis dengan pengelolaan yang akan dilakukan oleh Bumdes. Agar hal ini dapat berlangsung, Bumdes dan

Desa Benteng perlu melakukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai stakeholders untuk membuka desa wisata di awal Februari tahun ini. Hal tersebut berdasarkan studi kelayakan dan pendampingan dari Sekolah Vokasi dan LPPM IPB melalui program “dosen mengabdi” yang dilakukan akhir tahun 2021,

Pokdarwis harus saling bersinergi dalam pengembangan desa wisata.

Dengan pengelolaan pariwisata melalui Bumdes, pendapatan desa dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit usaha desa lainnya sehingga menciptakan sebuah lini bisnis yang kuat dan saling berkesinambungan. Pelaku desa wisata dapat memberdayakan umkm, makanan khas desa, cinderamata, serta mengoptimalkan paket-paket wisata seperti *agroedutourism* sebagai paket wisata andalan dengan mengedepankan karakteristik pemberdayaan masyarakat dalam usaha desa.

Selain itu banyak kearifan lokal bisa dipromosikan, Keramahan (hospitality) akan tetap menjadi “identitas” dari mutu layanan ke konsumen. Tetapi itu saja tidak cukup. Di era pandemi wisatawan semakin peduli pada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (CHSE). Karena itu pelaku desa wisata perlu memahami hospitality service yang disempurnakan dengan *hygiene, low-touch, less crowd* (HLL) sebagai solusi untuk menghasilkan pelayanan paripurna.

Aspek keramahan (*Hospitality*) pelaku wisata dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan (*Servqual*) dalam menyambut kunjungan wisatawan. Pelaku desa wisata perlu menerapkan konsep mutu pelayanan prima diantaranya *tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance* (TERRA).

Konsep servqual (Terra) diantaranya: *Tangible* (berwujud) adalah kemampuan pelaku wisata dalam menunjukkan eksistensinya ke pihak eksternal, yaitu terkait dengan penampilan sarana dan prasarana, fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan sarana komunikasi di daerah yang dijadikan destinasi wisata. Empathy dalam hal ini kepedulian pelaku desa wisata dalam melakukan komunikasi yang memiliki rasa hormat, bersahabat dan kemampuan memahami kebutuhan wisatawan serta calon wisatawan. *Reliability* (kehandalan) kemampuan pelaku wisata untuk memberikan pelayanan yang ramah dan terpercaya, memberikan informasi yang mudah dan lengkap



□ Desa wisata. Foto: Dok. Kemenparekraf

untuk wisatawan. **Responsiveness** (cepat tanggap) adalah kemampuan pelaku wisata untuk membantu dan memberikan pelayanan yang tepat dan cepat dalam menyebarkan informasi yang jelas kepada wisatawan. **Assurance** (Jaminan kepastian) kemampuan pelaku wisata mencakup pengetahuan, kesopanan, sifat terpercaya dalam menjamin kepastian dan keadaan wisatawan dalam kunjungan di desa wisata.

Desa Benteng, berdasarkan data SDGs Desa, secara umum termasuk kriteria cukup untuk aspek mengakhiri kelaparan, akses energi, dan kota berkelanjutan. Untuk kriteria kurang baik dalam aspek diantaranya kualitas gender, akses produksi dan konsumsi berkelanjutan, sedangkan sangat kurang untuk aspek pendidikan ber-kualitas, pekerjaan yang layak, mengurangi ketimpangan dan kemitraan.

Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu diperkuat pengembangannya adalah goals yang masuk kriteria ku-

rang dan sangat kurang. Desa Benteng memiliki potensi alam yang sangat menarik untuk dikelola sebagai potensi wisata alam terutama adanya aliran sungai tiga muara yang dapat dijadikan wisata *River Tubing* dan jembatan gantung yang menarik untuk spot photo para pengunjung. Potensi lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata budaya karena Desa Benteng memiliki warisan budaya yang cukup tua, antara lain adanya Masjid Miftahul Jannah yang berdiri sejak tahun 1713 M dan Klenteng "hok tek bio" berdiri tahun 1823.

Dengan adanya dua simbol keagamaan yang cukup tua tersebut, menandakan tingginya nilai-nilai toleransi yang ada di wilayah Desa Benteng, hal ini dapat dijadikan sebagai keunggulan lokal yang dapat direplikasi oleh desa lainnya. Selain itu lokasi Desa Benteng yang strategis dapat diakses melalui jalan raya Darmaga-Ciampea, Lewiliang-Ciampea atau dari Atang Sanjaya-Ciampea sehingga memudahkan untuk calon wisatawan yang akan berkunjung dari berbagai daerah. ■

BRAFOPMK



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Selamat **Hari Nelayan Nasional** **6 April 2022**

Terima Kasih

Nelayan Indonesia!

Perjuanganmu menempuh
badai dan gelombang,
membuat kami bisa
menikmati hasil laut
dan ikan bergizi
bagi bangsa

BRAFOPMK



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia



**Selamat
th Hari
Solidaritas
Asia Afrika**
24 April 2022



'Recover Together, Recover Stronger'

**Semangat Solidaritas Asia Afrika
untuk Perubahan dan Perdamaian Dunia**

BRAFOPMK



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

**Indonesia Tanggap
Perubahan Iklim,
aksi integrasi
membangun ketahanan
menjaga sumber
daya pangan, air,
dan energi untuk dunia**



**Selamat
Hari Bumi
2022**
#InvestInOurPlanet

